Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa
Vol 06 No 01 Maret 2025 (1-7)
https://villages.pubmedia.id/index.php/villages/index
Prefix 10.47134

Upaya Koordinasi Satu Data Indonesia (SDI) di Kota Padang

Yori Azizah*, Iip Permana

Universitas Negeri Padang

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya koordinasi Satu Data Indonesia (SDI) di Kota Padang dan faktor apa saja yang menyebabkan lemahnya koordinasi dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia (SDI) di Kota Padang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya koordinasi SDI di Kota Padang menghadapi beberapa tantangan mendasar, antara lain kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, rendahnya komitmen pegawai terhadap pentingnya data, dan keterbatasan anggaran. Tantangan-tantangan tersebut memerlukan solusi yang terintegrasi, yaitu penambahan sumber daya manusia, regulasi yang kuat, dan alokasi anggaran yang memadai, untuk mencapai tata kelola data yang akurat dan terintegrasi. Integrasi ketiga unsur tersebut diharapkan dapat meningkatkan koordinasi dan efektivitas pelaksanaan SDI di Kota Padang.

Kata Kunci: upaya, koordinasi, Satu Data Indonesia

DOI:
https://doi.org/10.47134/villages.v6i1.173
*Correspondence: Yori Azizah
Email: yoriazizah@gmail.com

Received: 07-08-2024
Accepted: 14-08-2024
Published: 21-08-2024

Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Abstract: *This research aims to find out how efforts to coordinate One Data Indonesia (SDI) in the City of Padang and what factors cause weak coordination in the implementation of One Data Indonesia (SDI) in the City of Padang. The method used in this research is a qualitative research method with a descriptive approach. Data collection was obtained through interviews and document study. The research results show that SDI coordination efforts in Padang City face several fundamental challenges, including a lack of competent human resources, low employee commitment to the importance of data, and budget limitations. These challenges require integrated solutions, namely additional human resources, strong regulations, and adequate budget allocation, to achieve accurate and integrated data governance. The integration of these three elements is expected to improve coordination and effectiveness of SDI implementation in Padang City.*

Keywords: *efforts, coordination, One Indonesian Data*

Pendahuluan

Pada saat sekarang data banyak dihasilkan baik dari masyarakat maupun pemerintah, untuk mengelola data yang dihasilkan diterbitkanlah Peraturan Presiden No 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Satu Data Indonesia merupakan sebuah kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan untuk menciptakan data yang berkualitas, mudah diakses, dan dapat dimanfaatkan antara instansi pusat dan daerah. Dalam tata kelola data memandu bagaimana pengendalian diterapkan dan juga menyediakan mekanisme untuk memantau kepatuhan dan tolak ukur terhadap data dasar yang telah ditetapkan (Thompson et al., 2015). Satu Data Indonesia sangat penting untuk mencapai integrasi dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan. Oleh karena itu, sistem ini memerlukan data yang tepat, terkini, terintegrasi, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, serta dapat dibagi dan diselenggarakan dengan baik secara menyeluruh dan berkelanjutan. Dalam peyelenggaraan Satu Data Indonesia, perlu adanya koordinasi antara penyelenggara kebijakan, koordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia terdiri atas perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data dan penyebarluasan data.

Sebagai langkah tindak lanjut dari Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 mengenai Satu Data Indonesia, Pemerintah Kota Padang menerbitkan Peraturan Wali Kota Padang No. 40 Tahun 2021 yang mengatur Penyelenggaraan Satu Data Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Satu Data Indonesia di Kota Padang dijalankan oleh pembina data, walidata, walidata pendukung, dan produsen data. Implementasi Satu Data Indonesia melibatkan beberapa komponen utama yang telah diatur dalam Peraturan Presiden tersebut, yaitu perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaan data, dan penyebarluasan data.

Satu data Indonesia dalam pelaksanaannya di Kota Padang memilki 51 Organisasi Perangkat Daerah yang masih belum optimal dalam pengimplementasian Satu Data. Berdasarkan observasi yang dilakukan terdapat beberapa kendala yaitu kurangnya kualitas dan kapasitas sumber daya manusia untuk menjalakan kebijakan Satu Data karena dengan sumber daya manusia yang memadai akan terlaksana tujuan kebijakan dengan efektif. Faktor pendanaan juga menjadi salah satu kunci suksesnya penerapan kebijakan Satu Data Indonesia di Kota Padang. Untuk mewujudkan Sumber daya Manusia dan infrastruktur yang mumpuni diperlukan dukungan dana. Sebagai kelanjutan dari hal diatas, penelitian ini berusaha untuk melihat bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi kendala yang terjadi dalam koordinasi Satu Data Indonesia di Kota Padang.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian ini di beberapa Instansi Pemerintah Kota Padang, yang tepatnya berlokasi di Komplek Balai Kota Padang, Jalan Bagindo Aziz Chan No. 1 Aia Pacah, Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* untuk memilih informan. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen, kemudian dianalisis dengan beberapa langkah, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Upaya Koordinasi Satu Data Indonesia (SDI) di Kota Padang

Koordinasi yang efektif adalah aspek penting dalam pelaksanaan Satu Data Indonesia (SDI), terutama di tingkat pemerintah daerah seperti Kota Padang. SDI bertujuan untuk menciptakan sistem pengelolaan data yang akurat, terintegrasi, dan mudah diakses oleh berbagai pihak guna mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih baik. Begum dan Momen (2019) mendefinisikan koordinasi sebagai proses penyelarasan unit, peran, tanggung jawab, serta upaya untuk menyesuaikan tindakan dan keputusan organisasi guna mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Secara lebih luas, Leonard (dikutip oleh B & Fatahilah, 2019) mengartikan koordinasi sebagai usaha untuk menyesuaikan setiap bagian serta menggerakkan dan mengoperasikan bagian-bagian tersebut pada waktu yang tepat, sehingga setiap bagian dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap hasil keseluruhan. Berdasarkan wawancara dengan pihak terkait, beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah Kota Padang untuk mengatasi kendala koordinasi dalam pelaksanaan SDI. Langkah-langkah tersebut mencakup penambahan SDM, penyusunan regulasi, dan identifikasi masalah penganggaran, yang semuanya bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas program ini.

Dalam upaya memperkuat koordinasi dan efektivitas pelaksanaan Satu Data Indonesia (SDI) di Kota Padang, pemerintah telah mengambil serangkaian langkah strategis yang mencakup penambahan sumber daya manusia (SDM), penyusunan regulasi, dan identifikasi masalah penganggaran. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah yang selama ini menghalangi pelaksanaan program SDI.

Pertama, pemerintah menyadari bahwa jumlah SDM yang terlibat dalam pelaksanaan SDI masih belum cukup memadai, baik dari segi jumlah maupun mutu. Kekurangan tenaga kerja yang kompeten dapat menghambat proses pengumpulan, pengelolaan, dan analisis data yang terintegrasi, yang merupakan inti dari program SDI.

Seperti yang sampaikan oleh bapak Windra Deddy selaku Sekretaris Dinas Kominfo kota padang:

> *"mengajukan rekruitmen secara formal seperti permohonan penambahan staff pada perekrutan asn pada tahun berikutnya dan informal, secara informal dengan cara melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi yang memiliki bidang statistik, dan membuka peluang magang terhadap mahasiswa-mahasiswa."*

Oleh karena itu, pemerintah telah mengajukan permohonan penambahan staf pada periode perekrutan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang akan datang. Penambahan ini bertujuan untuk memastikan bahwa ada cukup tenaga kerja yang dapat menangani tugas-tugas teknis dan administratif yang terkait dengan SDI. Dengan adanya SDM yang lebih memadai, diharapkan koordinasi antar instansi dalam pelaksanaan program ini dapat berjalan lebih efisien, mengurangi risiko keterlambatan atau kesalahan dalam pengolahan data.

Selain itu, penyusunan regulasi menjadi langkah penting yang diambil pemerintah untuk meningkatkan komitmen dan keterlibatan SDM dalam pelaksanaan SDI. Pemerintah Kota Padang tengah menyusun sebuah peraturan walikota yang bertujuan untuk memperkuat tanggung jawab pegawai dalam mendukung implementasi SDI. Regulasi ini diharapkan dapat memberikan panduan yang jelas mengenai fungsi dan kewajiban setiap pihak dalam proses pengelolaan data, serta mendorong adanya kesadaran dan komitmen yang lebih kuat dari para pegawai. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Chairi Fadli, S.ST selaku Statistisi Ahli Madya di BPS Kota Padang:

> *"langkah awal yang dilakukan saat ini dari produk hukum, melalui forum SDI, BPS dan Walidata mencoba menyusun perwako, format surat edaran dari sekretaris daerah terkait penyelenggaraan statistic sektoral di kota padang, ada beberapa point untuk mendorong OPD atau mewajibkan OPD dalam penyelenggaraan SDI seperti mengumpulkan data."*

Dengan adanya peraturan yang tegas, setiap individu yang terlibat dalam pelaksanaan SDI akan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya kontribusi mereka dalam mencapai tujuan program ini. Namun, meskipun upaya penambahan SDM dan penyusunan regulasi menunjukkan kemajuan, masalah penganggaran masih menjadi tantangan yang signifikan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ir. Windra Deddy selaku sekretaris Dinas Kominfo Kota Padang:

"terkait anggaran yg tidak mencukupi, kami berupaya untuk sebisa mungkin memadai, tapi yg terjadi dilapangan tidak ada yg tau"

Hingga saat ini, belum ada langkah konkret dari pemerintah dalam hal pengalokasian anggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan SDI secara menyeluruh. Penganggaran yang tepat sangat diperlukan untuk mendanai berbagai aspek penting dari SDI, termasuk pengembangan infrastruktur teknologi, pelatihan SDM, dan biaya operasional harian. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, berbagai inisiatif yang telah dilakukan mungkin tidak akan dapat mencapai hasil yang maksimal.

Oleh karena itu, identifikasi dan solusi terhadap masalah penganggaran harus menjadi prioritas pemerintah untuk memastikan kelancaran pelaksanaan SDI di Kota Padang. Dengan mengkoordinasikan penambahan SDM, regulasi yang kuat, dan alokasi anggaran yang tepat, diharapkan program Satu Data Indonesia dapat berjalan secara efektif, menghasilkan data yang akurat, dan mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data di berbagai sektor pemerintahan.

Faktor-Faktor Penyebab Lemahnya Koordinasi Dalam Penyelenggaraan Satu Data Indonesia pada Pemerintahan Kota Padang

Lemahnya koordinasi dalam penyelenggaraan kebijakan satu data Indonesia di Kota Padang dihadapi oleh beberapa faktor seperti kurangnya kesadaran pentingnya data dan komitmen OPD sebagai penghasil data menjadi faktor utama yang menjadi faktor lemahnya koordinasi. Selain itu, kekurangan sumber daya manusia dan kekurangan anggaran menjadi faktor penghambat koordinasi. seperti yang disampaikan oleh bapak Ir. Windra deddy selaku Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang pada senin, 24 Juni 2024, bahwa:

"….dalam penyelenggaraan satu data, yang menjadi faktor lemahnya koordinasi terdapat pada kesadaran dan komitmen OPD terhadap pentingnya data dalam pemerintahan. Khususnya dalam pengumpulan data. lemahnya koordinasi juga di pengaruhi oleh kekurangan sumber daya manusia serta sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan kompetensi latar belakang pendidikannya. Faktor lemahnya koordinasi juga dipengaruhi oleh anggaran. Dimana di Kota Padang anggaran untuk melakukan sosialisasi atau mengadakan pertemuan itu terbilang kurang hal tersebut diskominfo juga susah bergerak, karena setiap pertemuan memerlukan anggaran…."

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan informan yaitu Fungsional perencanaan ahli madya di Bappeda Kota Padang yang dijabat oleh Rulli Saputra, S.ST., M.Si pada Jumat 5 Juli 2024, menyampaikan bahwa:

> *"…dalam penyelenggaraan satu data sudah ada anggaran yang disiapkan, namun tidak sepenuhnya tercover oleh anggaran tersebut…"*

Kurangnya kesadaran pentingnya data oleh OPD menjadi faktor lemahnya koordinasi dalam penyelenggaraan satu data di Kota Padang, dimana kesadaran pentingnya data dalam penyelenggaraan kebijakan ini merupakan tiang dalam penyelenggaraan kebijakan ini. Selain itu kekurangan sumber daya manusia dapat menghambat koordinasi dalam penyelenggaraan kebijakan ini dengan cara yang efektif. Serta kekurangan anggaran juga menghambat koordinasi pelaksanaan kebijakan karena jika anggaran tidak ada tidak bisa menghambat kegiatan seperti kegiatan sosialisasi, pelatihan serta melakukan arahan yang memerlukan dana.

Kesimpulan

Upaya koordinasi Satu Data Indonesia (SDI) di Kota Padang menunjukkan bahwa meskipun pemerintah telah mengambil langkah strategis seperti penambahan SDM, penyusunan regulasi, dan identifikasi masalah penganggaran, tantangan-tantangan mendasar masih perlu ditangani lebih lanjut. Kekurangan SDM yang kompeten, rendahnya komitmen dan kepedulian pegawai terhadap pentingnya data, serta keterbatasan anggaran adalah faktor utama yang menghambat efektivitas pelaksanaan SDI. Tanpa dukungan finansial yang memadai, upaya penambahan staf dan peraturan walikota mungkin tidak dapat mencapai hasil yang optimal. Oleh karena itu, untuk memastikan keberhasilan SDI, perlu adanya sinkronisasi antara penambahan SDM, regulasi yang kuat, dan alokasi anggaran yang tepat, guna mengatasi kelemahan dalam koordinasi dan mencapai tujuan tata kelola data yang akurat dan terpadu.

Daftar Pustaka

Aman, A. G., & Satlita, L. (2018). Koordinasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern. *Journal of Public Policy and Administration Research*, *3*(2), 162–175.

Amelia, R., & Rahayu, A. S. Y. (2023). Analysis Of Satu Data Indonesia Policy Implementation: The Role Of BPS-Statistic Indonesia As A Statistical Data Coach. *Jurnal Darma Agung*, *31*(1), 708. https://doi.org/10.46930/ojsuda.v31i1.3115

Anisa, Z. L., Sunu, R., & Zarkasyi, A. (2023). Proses Kolaborasi Kebijakan Satu Data Salatiga Dalam Menyediakan Informasi Publik Di Kota Salatiga. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 1–23.

B, A., & Fatahilah, A. (2019). Koordinasi Pemerintahan Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Penduduk Rentan Di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Registratie*, *1*.

Begum, M. M., & Momen, M. N. (2019). Coordination and Effective Governance. Global Encyclopedia of Public Administration, Public Policy, and Governance, 1–6.

Falahah, Kusumasari, T. F., & Santoso, A. F. (2017). Framework for Measuring Readiness of Satu Data Indonesia (SDI) Implementation. *Atlantis Press*, *207*.

Firmansyah, R., Mangngasing, N., & Sussanti. (2022). Koordinasi Pendidikan Masyarakat Pada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Kana Mapande Kota Palu. *Paradigma*, *1*(2), 109–128.

Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitaif. In *Metode Penelitian Kualitatif&Kuantitaif* (Vol. 53, Issue 9). CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta.

Peraturan Badan Pusat Statistik No 4 Tahun (2020) tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik.

Peraturan Daerah Wali Kota Padang Nomor 40 Tahun (2021) tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun (2019) tentang Satu Data Indonesia. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Birokrasi Republik Indonesia.

Perwali padang no 81 tahun (2020) tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan tata kerja dinas komunikasi dan informatika.

Thompson, N., Ravindran, R., & Nicosia, S. (2015). Government data does not mean data governance: Lessons learned from a public sector application audit. *Elsevier*, *4C*.